

ABSTRAKSI

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Penjelasan UUD 1945 mengatakan antara lain. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (Machsstaat). UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dengan demikian negara Indonesia adalah Negara konstitusi berdasarkan demokrasi dan berbentuk republik kesatuan. Dalam prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan bernegara istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian negara yang menganut system demokrasi maka pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Pemerintah Demokrasi adalah suatu pemerintah yang melaksanakan kehendak rakyat, akan tetapi kemudian ditafsirkan dengan suara terbanyak dari rakyat banyak, jadi tidak melaksanakan kehendak seluruh rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi dijamin hak-hak kebebasan setiap orang dalam suatu Negara.

Fenomena pasangan calon (Paslon) tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah (PILKADA) sering terjadi, hal ini merupakan anomali bagi Indonesia yang memiliki sistem multipartai dan jumlah penduduk tinggi. Adanya daerah-daerah dengan Paslon tunggal disebabkan sedikitnya oleh empat faktor:

1. Rendahnya kaderisasi Partai Politik.
2. Biaya politik yang tinggi.
3. Dinamika politik lokal di daerah yang bersangkutan.
4. Adanya kenaikan mabang batas.

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu dengan satu pasangan calon (calon tunggal) pada prinsipnya mekanisme penyelesaian hasil Pemilu dengan calon tunggal sama dengan mekanisme penyelesaian dalam Pemilu dengan calon lebih dari satu, hanya saja terdapat perbedaan tentang para pihak dan obyek Termohon yang diajukan dalam perselisihan. Para pihak yang dapat dijadikan subyek atau Pemohon dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu dengan calon tunggal adalah Pemantau Pemilihan. Sengketa hasil Pemilu calon tunggal ada persyaratan prosentase perolehan suara yang dibatasi secara limitatif, kalau sudah 70 % yang setuju dengan pasangan calon tunggal atau kalau tidak setuju dengan calon tunggal hanya 10% suara maka tidak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Dalam pesta Demokrasi Penyelesaian sengketa pemilu dengan calon tunggal

ABSTRACT

The legal state is a State which stands above the law that guarantees justice to its citizens. The elucidation of the 1945 Constitution says among other things. The state of Indonesia is based on the law (Rechtsstaat), not based on power (Machsstaat). The 1945 Constitution stipulates that the Indonesian state is a sovereign constitutional state and thus the state of Indonesia is a constitutional state based on democracy and is a unitary republic. In the principle of people's sovereignty (Democracy) in the life of nation and state.

In the life of the state the term democracy implies that the people who provide provisions in the problems of recognizing their lives, including assessing the policy of the State, because the policy will determine the lives of its people. Thus the country that embraces the democratic system then the government is held at the will of the people. The Government of Democracy is a government that carries out the will of the people, but then it is interpreted with the most votes from the masses, so it does not carry out the will of all the people. In a democratic government guaranteed the freedom rights of everyone in a State.

The phenomenon of single candidate pair (Paslon) in the general election of Regional Head (PILKADA) is common, this is an anomaly for Indonesia which has multiparty system and high population number. The existence of areas with single Paslon is caused by at least four factors:

1. The low level of political party cadre.
2. High political costs.
3. The dynamics of local politics in the region concerned.
4. There is a rise in border limit.

The Constitutional Court has the authority to resolve the dispute on the results of the General Election of Regional Heads with a single candidate pairs in principle the mechanism for completing the results of the General Election of Regional Heads with a single candidate is equal to the mechanism of settlement in

the General Election with more than one candidate, except that there are differences on the parties and the object of the Respondent submitted in dispute. The parties who can be subjected or the Petitioner in the settlement of dispute on the result of Pemilukada with a single candidate is the Election Monitor. Disputes over the results of the election of a single candidate there is a requirement of the percentage of vote acquisition that is limited by limitative, if 70% agree with single candidate pair or if not agree with single candidate only 10% vote then can not be sued to the Constitutional Court.

Keywords: In ademocracy pwrty solving election disputes with a single candidate